

## **BAB III**

### **EKSPOR SAPI AUSTRALIA**

Konsumsi daging sapi yang terus mengalami peningkatan menyebabkan perlu adanya impor sapi, terutama dari Australia yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Indonesia menjadi mitra dagang sapi utama Australia, diikuti oleh Turki 13%, Israel 7%, China 6%, Mesir 3%, Malaysia 3% dan sisa dari target ekspor sapi Australia menyebar ke negara-negara lain di dunia (Australian bureau of Staristics, 2011). Selain itu, menurut analisis dari Bord Bia, sebuah situs yang menjanging data terkait tingkat konsumsi daging sapi di Asia, Indonesia sejak tahun 2001 hingga ditahun 2011, mengalami persentase pertumbuhan akan kebutuhan konsumsi daging sapi, utamanya dikatakan adalah daging sapi yang cukup besar, yaitu dengan persentase sekitar 40%. Terlebih Indonesia, bersama dengan negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Vietnam memang merupakan negara 'major importer' untuk produksi sapi hasil ekspor dari Negara Australia (Duggan, 2011).

Australia merupakan produsen utama berbagai jenis produk pertanian yang cukup besar berupa ternak hidup serta olahannya. Komoditi-komoditi andalan ekspor produk pertanian Australia dapat dilihat pada data tabel di bawah ini:

| PRODUK                              | NEGARA TUJUAN   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Ternak Hidup dan Daging Sapi</b> | Indonesia, ASEAN, Jepang , Timur Tengah, Amerika Serikat dan Afrika |
| <b>Kapas kualitas Tinggi</b>        | Indonesia, Cina, Taiwan, Jepang, Thailand dan Korea Selatan         |
| <b>Makanan olahan (Anggur)</b>      | Inggris, Amerika Serikat, Selandia Baru, Kanada dan Jerman          |
| <b>Wol</b>                          | Cina, Italia, India, Taipei, Jerman, Jepang dan Perancis            |
| <b>Gula Pasir</b>                   | Kanada, Korea, Malaysia, Jepang dan AS                              |

Sumber : Direktorat Jenderal Kerjasama Bilateral Kementerian Perdagangan RI

### **Tabel 3. 1 Komoditi-komoditi andalan ekspor produk pertanian Australia**

Dari sejumlah produksi daging sapi dunia, pemasok terbesar bagi Indonesia adalah Australia. Berdasarkan data MLA tahun 2010 , sejak tahun 1990, Indonesia mulai mengimpor sapi hidup dari Australia. Pada tahun 1990, impor sapi 8.061 ekor namun pada tahun-tahun berikutnya tumbuh dan berkembang sangat pesat bahkan secara eksponensial dengan rata-rata 2 kali lipat per tahun dan pada tahun 1997 mencapai 428.077 ekor atau naik 3 kali lipat, dan puncaknya pada tahun 2009 impor sapi hidup dari Australia mencapai 772.868 ekor yang merupakan rekor tertinggi sepanjang 20 tahun sejak 1990 (Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, 2013).

**Tabel 6. Volume Ekspor Ternak Hidup Australia Berdasarkan Negara Tujuan**

|                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Live cattle            |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Slaughter cattle b     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Asia                   |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Indonesia              | 214.6 | 219.6 | 302.8 | 342.1 | 448.7 | 427.6 | 286.5 | 252.3 |
| Japan                  | 18.7  | 19.1  | 18.5  | 17.9  | 14.3  | 14.9  | 15.5  | 19.7  |
| Malaysia               | 20.8  | 23.2  | 29.3  | 15.0  | 13.7  | 3.7   | 13.2  | 13.5  |
| Philippines            | 23.2  | 9.9   | 9.6   | 10.3  | 6.8   | 7.9   | 9.0   | 15.2  |
| Europe                 |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Turkey                 | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.2   | 82.9  | 25.5  |
| Middle East            |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Egypt                  | 3.8   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 29.9  | 18.3  | 26.4  |
| Israel                 | 25.8  | 32.4  | 39.5  | 35.9  | 14.6  | 21.2  | 33.0  | 45.7  |
| Jordan                 | 11.0  | 9.0   | 2.1   | 0.5   | 5.3   | 14.7  | 4.8   | 0.2   |
| Saudi Arabia           | 0.0   | 15.7  | 16.9  | 5.3   | 12.8  | 4.8   | 16.0  | 0.0   |
| Total slaughter cattle | 335.1 | 341.3 | 435.8 | 446.0 | 537.6 | 549.5 | 499.1 | 411.7 |
| Breeding cattle        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| China                  | 114.0 | 18.3  | 11.9  | 10.4  | 37.1  | 102.2 | 102.3 | 132.8 |
| Indonesia              | 0.3   | 0.9   | 0.0   | 0.1   | 3.7   | 12.6  | 2.8   | 2.4   |
| Russian Federation     | 0.0   | 0.0   | 14.2  | 27.9  | 37.5  | 22.7  | 24.5  | 80.8  |
| Total breeding cattle  | 128.9 | 62.6  | 61.1  | 94.6  | 108.4 | 151.6 | 160.6 | 239.1 |
| Total live cattle      | 464.0 | 404.0 | 496.9 | 540.7 | 646.0 | 701.2 | 659.6 | 650.8 |

Sumber : *Australian Bureau of Statistics, International Trade, Australia, cat. no. 5465.0, Canberra; Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, Export Statistics, Livestock Exports, Canberra*

**Tabel 3. 2 Volume Ekspor Ternak Hidup Australia**

Pada tanggal 27 Mei 2011, media rilis Australia yang dikeluarkan oleh National Farmers Federation, Sheepment Council Australia, Cattle Council Australia, Northern Territory Cattlemen's Association, Australia Live Stock Exporters' Council, Live Corp and Meat and Livestock Australia (MLA) meminta kepada industri terkait di Indonesia untuk menghentikan pasokan sapi kepada tiga rumah potong hewan di

Lampung, Tangerang, dan Medan karena cara pemotongan sapi yang dianggap kejam. Pada tanggal 30 Mei 2011 pukul 20.30 televisi Australia (ABC Four Corners Program) melakukan penayangan video yang menampilkan perlakuan buruk terhadap hewan yang dipotong di beberapa rumah potong di Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2011 Pemerintah Australia melalui Menteri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan telah mengeluarkan media release DAFF 11/174 L menyatakan bahwa Australia memberhentikan ekspor sapi hidup ke Indonesia sampai dengan suatu tindakan pengamanan (safeguard) dibentuk untuk memastikan supply chain dan transparansi pengiriman sapi di Australia sampai di RPH di Indonesia. Sejalan dengan peristiwa tersebut, Indonesia pun menghentikan impor sapi Australia selama 6 (enam) bulan hingga tahun 2012. Hal ini juga terkait dengan rencana swasembada daging Indonesia. Namun, impor daging beku asal Australia tetap berlanjut agar pasokan sapi tetap aman.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan Negara penting bagi Australia perihal impor sapi. Hal ini ditunjukkan dari populasi penduduk di Indonesia yang mencapai 279 juta jiwa secara tidak langsung mengakibatkan konsumsi akan kebutuhan pangan tinggi salah satunya ialah konsumsi daging sapi karena memang kandungan gizi yang dipunya sangat baik. Dengan jarak yang dekat menjadikan Indonesia negara tujuan utama bagi Australia mengimpor Sapi-sapinya.

## **A. Kebijakan Ekspor Sapi Australia**

Berkaitan dengan ekspor sapi, maka Australia telah menetapkan beberapa kebijakan-kebijakan terkait ekspor sapi Australia. Menurut kedutaan besar Australia Indonesia (2017) dapat dijabarkan kebijakan ekspor sapi Australia adalah sebagai berikut:

### **1. Diversifikasi Ekspor/Menambah Keragaman Barang Ekspor**

Diversifikasi ekspor merupakan penganekaragaman barang ekspor dengan memperbanyak macam dan jenis barang yang diekspor.

### **2. Subsidi Ekspor**

Subsidi ekspor diberikan dengan cara memberikan subsidi/bantuan kepada eksportir dalam bentuk keringanan pajak, tarif angkutan yang murah, kemudahan dalam mengurus ekspor, dan kemudahan dalam memperoleh kredit dengan bunga yang rendah.

### **3. Premi Ekspor**

Untuk lebih menggiatkan dan mendorong para produsen dan eksportir, pemerintah dapat memberikan premi atau insentif, misalnya penghargaan atas kualitas barang yang diekspor. Pemberian bantuan keuangan dari pemerintah kepada pengusaha kecil dan menengah yang orientasi usahanya ekspor.

### **4. Devaluasi**

Devaluasi merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Dengan kebijakan devaluasi akan mengakibatkan harga barang ekspor di luar negeri lebih murah bila diukur

dengan mata uang asing (dollar), sehingga dapat meningkatkan ekspor dan bisa bersaing di pasar internasional.

5. Meningkatkan Promosi Dagang ke Luar Negeri

Pemasaran suatu produk dapat ditingkatkan dengan mempromosikan produk yang akan dijual. Untuk meningkatkan ekspor ke luar negeri maka pemerintah dapat berusaha dengan melakukan promosi dagang ke luar negeri, misalnya dengan mengadakan pameran dagang di luar negeri agar produk dalam negeri lebih dapat dikenal.

6. Menjaga Kestabilan Nilai Kurs Mata Uang Dalam Negeri terhadap Mata Uang Asing

Kestabilan nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing sangat dibutuhkan oleh para importir dan pengusaha yang menggunakan peroduk luar negeri untuk kelangsungan usaha dan kepastian usahanya. Bila nilai kurs mata uang asing terlalu tinggi membuat para pengusaha yang bahan baku produksinya dari luar negeri akan mengalami kesulitan karena harus menyediakan dana yang lebih besar untuk membiayai pembelian barang dari luar negeri. Akibatnya harga barang yang diproduksi oleh pengusaha tersebut menjadi mahal. Hal ini dapat menurunkan omzet penjualan dan menurunkan laba usaha, yang akhirnya akan mengganggu kelangsungan hidup usahanya.

7. Mengadakan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional

Melakukan perjanjian kerja sama ekonomi baik bilateral, regional maupun multilateral akan dapat membuka dan memperluas pasar bagi produk dalam

negeri di luar negeri. serta dapat menghasilkan kontrak pembelian produk dalam negeri oleh negara lain. sebagai contohnya kerjasama dalam hal perdagangan antara Australia dan Indonesia.

## **B. Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional Australia-Indonesia**

Hubungan perdagangan antara Australia dan Indonesia pun telah lama terjalin. Menurut Kementerian luar negeri Indonesia berikut dasar hubungan kerjasama perdagangan Indonesia dan Australia :

- a. *Trade agreement between the Republic of Indonesia and the Commonwealth Australia*, Nota persetujuan dagang (No. Agenda 346), Canberra tanggal 14 November 1972.
- b. *Exchange of Letters between the Government of Republic of Indonesia and Government of Australia*, Jakarta 10 November 1968.
- c. *Trade Agreement Between the Government Republic of Indonesia and the Commonwealth Australia* yang diratifikasi melalui Kepres No.6 Tahun 1973 Tanggal 27 Februari 1973.
- d. *Agreement Concerning the protection and enforcement of Copyright* yang ditandatangani di Jakarta Tanggal 17 November 1992.
- e. *Agreement Between the Government Republic of Indonesia and the Governement of Australia for Avodance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income*, di Jakarta tanggal 22 April 1992.
- f. *Agreement Between the Government Republic of Indonesia and the Governement of Australia Concerning the Promotion and Protection of Investments*, diratifikasi melalui Keppres No.36 Tahun 1993 Tanggal 15 Mei 1993.
- g. *Memorandum of Understanding between the Government of Australia and theGovernment of the Republic of Indonesia on Technical Cooperation in Financial Sectors*, Canberra 23 Septembe 1996.
- h. *Umbrella MoU Concerning Food Inspection and Certification Systems* yang ditandatangani di Bali Tanggal 24 Februari 1999.
- i. *Memorandum of Understanding between Department of Asian Relations and Trade of the Northern Territory of Australia and the Directorate General of Customs and Excise of the Department of Finance of the Republic of Indonesia on A Customs Facility in Darwin for Goods Shpped to Indonesia Ports other than in Java and Sumatera*, Bali 8 Juni 2011.

- j. *Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia on Collaborative Animal and Plant Health and Quarantine Activities*, Medan 29 Juli 2003.
- k. *Join Ministerial Statement Australia-Indonesia Ministerial Forum and Australia Indonesia Development Area Ministerial Meeting*, Canberra, 18 Maret 2005.
- l. *Trade and Investment Framework Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia*, Vientiane 29 September 2005.

Persetujuan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) merupakan dasar bagi hubungan Indonesia-Australia, terutama dalam peningkatan perdagangan, ekonomi dan investasi. Melalui perjanjian tersebut, ekspor barang Australia ke Indonesia akan mendapatkan bebas bea masuk dari sebesar 56% menjadi 92%, dari seluruh jenis komoditi barang yang diekspor Australia ke Indonesia, sedangkan 5% lainnya akan mendapatkan tarif bea masuk tidak lebih dari 5%. Bagi Indonesia, 99% eksportnya ke Australia akan menikmati bebas bea masuk, dan akan menjadi 100% bebas bea masuk pada saat perjanjian secara penuh diimplementasikan. AANZFTA ini mencakup barang, jasa, investasi dan kekayaan intelektual

Indonesia dan Australia memasuki tahap penting dalam peningkatan ekonomi kedua negara dengan dimulainya perundingan putaran pertama dalam kerangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (*Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA*) yang dilaksanakan pada tanggal 26 – 27 September 2012 di Jakarta. Kedua kepala negara sepakat untuk membentuk IA-CEPA yang idealnya merupakan *top up* dari ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade



*Agreement*, suatu kerjasama perdagangan bebas regional yang telah lebih dulu dibentuk. Di samping itu, Indonesia dan Australia telah sepakat untuk menargetkan total perdagangan sebesar USD 15 miliar pada 2015. Dalam kerangka IA-CEPA, kerjasama yang dapat dilakukan antara lain penurunan tarif bea masuk bagi beberapa produk Indonesia hingga 0% oleh Australia, diiringi oleh peningkatan standard Indonesia untuk produk-produk tersebut sehingga dapat memenuhi persyaratan standar Australia dan mendapat akses pasar (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2014).

Lebih lanjut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2014) menyatakan bahwa Indonesia dan Australia juga tergabung dalam *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) merupakan upaya kerjasama dari 21 negara dengan tujuan meningkatkan perdagangan bebas di kawasan Asia-Pasifik. APEC merupakan kerjasama perekonomian yang tidak mengikat namun berlandaskan komitmen bersama anggota-anggotanya. APEC bertujuan untuk meningkatkan perdagangan bebas di kawasan Asia-Pasifik. Tidak ada perjanjian yang harus ditandatangani karena APEC diikat melalui konsensus dan kerjasama yang mengacu pada *Bogor Goals* yang disepakati pada 1994 di Bogor, Indonesia. *Bogor Goals* bertujuan menciptakan perdagangan bebas dan terbuka serta meningkatkan investasi asing di negara anggota pada tahun 2010 untuk negara ekonomi maju, dan pada 2020 untuk negara ekonomi berkembang.